

# **SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK**

## **TIMOR LESTE TAHUN 1998 - 2002**

**Disusun Oleh :**

**Asyrul Fikri**

**Ridwan Melay**

**Tugiman**

**Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Riau**

**Jl.Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru**

**Email:Asyulfikri@ymail.com**

### **ABSTRACT**

History of East Timor which begins at the decolonization process by which the Portuguese colonial turmoil and conflict in the region. East Timor broke away from Indonesia after the holding of the referendum. The purpose of this study was to determine the factors that helped create the Democratic Republic of Timor-Leste, the role of Australia in the State of Timor-Leste, the impact of the fall of the new order and the emergence of the reform of the State of Timor-Leste, the transition process and the solution of problems in East Timor post polls, the process of handling cases of human rights violations in East Timor, as well as the relationship between Indonesia - Timor Leste after the establishment of the State of Timor-Leste.

The research method used is the method of Empirical and Historical Documentary. The goal is to reconstruct, analyze, evaluate, and explain the evidence to get the facts and achieve results that can be accounted for. The results showed that there are three important countries, namely the United States, Australia, and Portugal as well as UN agencies as arbitration in the State of Timor-Leste. It also can not be separated from the political and economic changes in Indonesia led by Habibie who then issued a second option, liberating East Timor. The trip to East Timor's independence marked by human rights violations committed by the military, eventually international parties also demanded Indonesia to implement the human rights tribunal to prosecute those involved. The issue of human rights is also an obstacle in the relationship between Indonesia and Timor-Leste's future, there are many parties who do not feel satisfied with what is done by the Government of Indonesia and the Government of Timor-Leste to address such matters.

Keyword : History Forming Of State of Timor Leste 1998-2002.

## PENDAHULUAN

Timor Timur dahulunya merupakan daerah jajahan Portugis yang pada masa itu di sebut dengan Timor Portugis. Timor Timur dahulunya merupakan daerah jajahan Portugis yang pada masa itu di sebut dengan Timor Portugis. Keadaan di Timor Portugis berubah setelah terjadinya revolusi bunga pada tanggal 25 April 1974. Isu dekolonisasi melahirkan politik dekolonisasi, terutama di Propinsi Timor Portugis. Mula-mula dibubarkanlah partai *Acgro Nacional Popular* (ANP), satu-satunya partai yang boleh berdiri di Timor Portugis. Selanjutnya, rakyat diperbolehkan membentuk partai-partai. Tak lama kemudian, tepatnya Juni 1974, muncul tiga tawaran dari Lisabon yaitu terus bersatu dengan Portugis, kemerdekaan atau integrasi dengan Indonesia. Pilihan-pilihan itu telah menyebabkan makin tajamnya perbedaan dalam tubuh partai-partai yang baru berdiri. **(Khairul Jasmi, 2002: 21).**

Dua hari setelah Fretilin secara sepihak memproklamasikan Republik Demokrasi Timor, di balibo – suatu tempat dekat perbatasan -- keempat partai politik yang mewakili mayoritas rakyat Timor Portugis bermufakat dan menghasilkan *Deklarasi Balibo*. Deklarasi 30 November 1975 itu adalah pernyataan kesepakatan mereka atas nama rakyat Timor Timur (sebelumnya Timor Portugis) memproklamasikan pengintegrasian bekas Timor Portugis ke negara kesatuan RI sebagai propinsi ke-27, Timor Timur, seraya meminta Pemerintah RI untuk menyempurnakan perumusan dan implementasi deklarasi tersebut bersama-sama dengan rakyat Timor Timur. **(E.M. Tomodok, 1996: 307).** Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melakukan serangan darat, laut dan udara ke Timor Leste. Invasi ini langsung mendapatkan kutukan keras dari PBB. Pada tanggal 22 Desember, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suara bulat menyepakati resolusi 384 yang mengakui hak warga Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka. Resolusi ini memuat juga pola posisi PBB di Timor Leste selama 24 tahun kedepan.

Pasca Deklarasi Balibo, Presiden Republik Indonesia kala itu, Soeharto, membentuk suatu tim pencari fakta gabungan (*Joint Fact Finding*) antara pemerintah dengan DPR untuk menyelidiki mengenai aspirasi rakyat Timor Leste sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Hasil penyelidikan lalu disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh presiden pada tanggal 17 Juli 1976, sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1976, yang isinya menerima Timor Leste sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27. Dalam perkembangannya, MPR kemudian mengesahkan melalui TAP MPR IV/MPR/1978 pada tahun 1978. Semenjak itulah *saga* tentang Timor Leste terus bergulir, agenda pembahasan masalah Timor Leste oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB. **(Syamsul Hadi dkk, 2007: 189-190).** Masuknya Timor Leste ke wilayah Indonesia di Tahun 1976 tidak lepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa Perang Dingin. Kala itu masuknya Indonesia lewat operasi militer ke Timor Leste mendapatkan restu negara-negara Barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timor Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin dan berubah menjadi *Cuba of Asia* dan mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk memenangkan status kedaulatannya di aras internasional bagi provinsi termuda itu.

Ketika reformasi bergulir tahun 1999 (**Syamsul Hadi dkk, 2007: 184-185**), perjuangan kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste mendapatkan momentum terbaiknya untuk merealisasikan cita-cita mereka, lepas dari kedaulatan Indonesia. Melemahnya stabilitas dan koordinasi politik nasional seiring kejatuhan Soeharto dan naiknya sang pengganti (Habibie) yang pada kala itu sudah cukup direpotkan dengan persoalan kolapsnya perekonomian nasional

karena didera krisis moneter semenjak tahun 1997, serta maraknya tuntutan internasional bagi pemerintah baru untuk membuka lebar keran demokratisasi di Indonesia, mengantarkan keluarnya tawaran opsi ke II di awal tahun 1999 bagi penyelesaian masalah Timor Leste. Hasilnya, dengan sangat “meyakinkan” kelompok pro-kemerdekaan menang mutlak dalam jajak pendapat tersebut (78,5%). Maka dengan demikian lahirlah negara termuda di dunia di penghujung abad 20 : *The Democratic Republic of Timor Leste*.

Berdasarkan tulisan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pembentukan Negara Republik Demokratik Timor Leste Tahun 1998-2002. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan Negara Republik Demokratik Timor Leste tahun 1998-2002.

### METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah atau membantu penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan Metode Historis atau Metode Sejarah dan Dokumentar. Sebagaimana dikemukakan **Gilbert J. Garraghan (1997: 33)**, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, **Louis Gottschalk (1983: 32)** menjelaskan metode sejarah sebagai “proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Metode historis bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan. Sasaran dalam penelitian ini adalah sejarah pembentukan negara Republik Demokratik Timor Leste tahun 1998-2002. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2012 hingga revisi terakhir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Studi Kepustakaan

Penulis langsung mempelajari, menganalisis dan mengolah data dari sumber seperti buku, majalah, surat kabar dan juga data-data dari internet yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan ditela'ah sesuai berita yang ditemukan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan tulisan berdasarkan bukti-bukti nyata dari sumber yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kenyataan atau gambaran peristiwa melalui, piagam, foto-foto, gambar, surat kabar dan lain-lain untuk mengetahui proses yang sebenarnya dari peristiwa yang sedang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Metode Analisa Data yang digunakan adalah metode sejarah seperti yang dijelaskan oleh **Louis Gottschalk (1983: 83)** dengan mensistematisasikan langkah-langkah itu sebagai berikut: Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan, Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak autentik, Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang autentik, Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti. Ringkasnya, setiap langkah ini biasa juga disebut secara berurutan yaitu heuristik, kritik atau verifikasi, *aufassung* atau interpretasi, dan *darstellung* atau historiografi. Sebelum keempat langkah ini, sebetulnya ada satu

kegiatan penting, yang oleh **Kuntowijoyo (1995: 89)** ditambahkannya menjadi lima tahap penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasinya Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak pernah disetujui oleh PBB dengan dikeluarkannya berbagai resolusi mengenai tindakan Indonesia tersebut. Namun keseriusan pemerintah Indonesia dibuktikan dengan subsidi pemerintah untuk pembangunan di Timor Timur yaitu dengan jumlah dana Rp.190 miliar setiap tahunnya ke Timor Timur (**Akhmad Kusaeni,2000:3**) di tambah dengan pendapatan asli daerah Rp. 10 miliar setiap tahunnya.Ternyata sejarah memilih jalannya sendiri. Event krusial yang menjadi *blunder* bagi pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan Timor Leste adalah peristiwa “santa cruz” tahun 1991. Saat itu tentara Indonesia menembaki orang-orang yang beriringan menuju pemakaman Santa Cruz. Orang-orang tersebut ingin meletakkan karangan bunga pada makam Sebastiao Gomes, yang tertembak oleh tentara dua minggu sebelumnya. Kejadian yang diperkirakan menewaskan sedikitnya 180 orang (**Joseph Nevins, 2008:43**) ini terekam oleh seorang wartawan asing dan langsung menyebar ke seluruh dunia. Kecaman keras serta merta datang dari berbagai penjuru dunia.Kala itu wacana kebebasan HAM begitu deras mengalir di masyarakat internasional seiring berakhirnya perang dingin dan tampilnya blok barat di bawah Amerika Serikat yang mengusung semangat demokrasi dan liberalisme sebagai pemenang. Peristiwa ini menjadi momentum strategis bagi perjuangan kelompok Fretilin yang telah lama menginginkan kemerdekaan atas wilayah tersebut. Menyusul perubahan politik di Indonesia pada tahun 1998 dari orde baru (Soeharto) digantikan oleh reformasi (Habibie), krisis moneter serta tuntutan dari berbagai pihak untuk membuka lebar keran demokratisasi mengantarkan keluarnya tawaran opsi kedua di awal tahun 1999 bagi penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Jajak pendapat pun diselenggarakan erentak di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Kemudian pada tanggal 4 September hasil jajak pendapat tersebut diumumkan yaitu 94.388 (21,5%) memilih otonomi khusus dan 344.540 (78%) merdeka. Semenjak itulah Timor Leste resmi lepas dari kedaulatan Indonesia.

Ada empat aktor eksternal yang paling substansial keterlibatannya dalam dinamika konflik di Timor Leste yaitu, Australia, Amerika Serikat, Portugal dan PBB. Bila kita komparasikan sikap dan peran aktor-aktor eksternal dalam konflik di Timor Leste tersebut, di fase Perang Dingin dan pasca Perang Dingin, nampak jelas terjadinya perubahan sikap dan kebijakan politik yang dikeluarkan Australia dan Amerika Serikat. Australia karena didasarkan motif kepentingan ekonomi, mengambil posisi politik di tahun 1999 yang bertolak belakang dengan yang dipertahankan selama kurang lebih 23 tahun sebelumnya dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Habibie, PM Australia John Howard menyerukan agar memposisikan Timor Leste sebagai sebuah bangsa yang sejajar posisinya dalam politik internasional. (**Syamsul Hadi, 2007: 197**).Amerika Serikat merespon lunak dan cukup tenang masuknya Indonesia ke bekas “provinsi luar negeri” Portugal itu yang sedang dilanda Perang Saudara, namun sikap ini berubah seiring berakhirnya perang dingin Penasehat Hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada masa itu, George Aldrich mengatakan, bahwa apabila suatu bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan diakui secara umum, maka hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali jika hak tersebut telah dilaksanakan. Dalam masalah Timor Leste, hak tersebut perlu dilaksanakan, karena secara hukum rakyat Timor Leste belum diberi kesempatan dalam hal

penentuan nasibnya.(Syamsul Hadi, 2007: 204).Portugal memanfaatkan dengan baik isu aneksasi Timor Leste oleh Indonesia tersebut untuk memperbaiki citra buruknya selama pemerintahannya di Timor Leste.Namun lewat manuver diplomatiknya di forum-forum internasional, Portugal sukses menggantikan peran Indonesia sebagai pahlawan bagi rakyat Timor Leste.Dan yang terakhir adalah PBB sebagai forum arbitrase internasional mencatatkan partisipasi yang aktif dan konsisten bagi kasus konflik Timor Leste tersebut.PBB memprakarsai suatu pembicaraan segitiga antara Portugal dengan Indonesia dibawah naungan PBB untuk mencari suatu penyelesaian masalah Timor Leste secara adil, menyeluruh, dan diterima secara internasional.

Sejak masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia yang membawa pergolakan bersenjata antara tahun 1974-1975, sejumlah korban tewas dalam rangka pengintegrasian wilayah tersebut. Dari berbagai sumber mengenai jumlah korban, setidaknya ribuan orang tewas baik dari pihak Indonesia (TNI/Polri) maupun dari masyarakat Timor Timur sendiri. Jumlah korban tewas dalam peristiwa ini tidak dapat disebutkan jumlahnya secara pasti, mengingat kedua belah pihak akan menggunakan sisi ini untuk kepentingan politis masing-masing. Meskipun demikian, peristiwa ini setidaknya mencerminkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia semasa orde baru di Timor Timur tergolong sangat serius. Pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia semasa Orde Baru semakin terlihat pada tanggal 12 November 1991 ketika aparat militer Indonesia melakukan penembakan membabi-buta terhadap massa-demostran yang hendak memperingati tewasnya Sebastio Gomes (aktivis pro-kemerdekaan). Dalam insiden ini yang kemudian terkenal dengan nama "Insiden Santa Cruz" jumlah korban tewas tidak diketahui secara jelas. Versi Komisi Penyelidik Nasional yang dibentuk pemerintah menyebut lebih dari 50 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Sedangkan versi masyarakat setempat dan jurnalis asing menyebut lebih dari 100 orang tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka. Insiden tersebut membawa citra buruk Indonesia di mata internasional, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur. (Arief Yulianto, 2002: 482).

Menurut dokumentar TV yang ditayangkan Historical Channel di New York pada bulan Juli 1999, 3.700 prajurit TNI dibunuh kelompok pro-kemerdekaan Timor Timur dalam kurun waktu 25 tahun. Sementara itu, Mayjen TNI (Purn.) Theo Syafei, mantan Panglima Daerah Militer Udayana, mengatakan bahwa kira-kira 5.000 prajurit TNI dan 100.000 jiwa penduduk Timor Timur gugur selama operasi militer melawan Fretilin. *The Jakarta Post*, 8 september 1999. (Lela E. Madjiah, 2002: xvi)

Data lainnya mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia,misalnya, selama tahun 1998 terjadi peningkatan sebesar 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya 1997, yaitu dari 513 kasus menjadi 656 kasus. Menurut DJOC (Diocesan Justice and Peace Commission), kategori pelanggaran HAM yang terbanyak adalah penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang 50%, penyiksaan dan perlakuan tidak wajar 25%, dan penghilangan secara paksa 10%.(Arief Yulianto, 2002: 483).HAM seharusnya tidak menjadi masalah bagi angkatan bersenjata yang profesional karena profesionalisme mencakup penghormatan HAM. TNI sendiri mengajarkan nilai yang bersifat sangat universal dan tercermin antara lain dalam Sumpah Prajurit,Sapta Marga,serta Delapan Wajib TNI,yang intinya tidak lain dari penghormatan atas HAM. Namun demikian, karena istilah HAM berasal dari "luar", terdapat kesenjangan pendapat, seolah-olah HAM itu sesuatu yang asing dan cenderung disiasati dengan

sikap curiga, bahkan penolakan. Selain itu, karena profesionalisme masih merupakan cita-cita bagi TNI, pemahaman tentang HAM di luar konsep ke-indonesiaan yang ditawarkan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI masih jauh dari yang diinginkan. Berbagai upaya telah dilakukan TNI dalam rangka meningkatkan kesadaran prajurit akan perlunya menegakkan HAM. Salah satu upaya itu dilakukan melalui kerja sama dengan Palang Merah Internasional (ICRC) dalam memberikan pelatihan tentang Hukum Humaniter Internasional melalui seminar-seminar. Selain itu, TNI juga menambah jam pelajaran bermuatan hukum humaniter dan hal yang berkaitan dengan HAM. TNI juga menerbitkan panduan praktis yang harus senantiasa dibawa oleh setiap prajurit saat bertugas. Upaya ini bukanlah hal yang mudah dilakukan karena masih cukup banyak anggota TNI yang memiliki pola pikir yang berlaku sepuluh tahun yang lalu, saat HAM hampir tidak mendapatkan tempat. Pola pikir ini pula yang merasuk dalam diri setiap prajurit TNI yang diikirimkan ke Timor Timur pada tahun-tahun awal integrasi. Mereka dijejali doktrin bahwa yang mereka hadapi itu komunis dan karena itu harus dihabisi. Indoktrinasi semacam ini sangat berperan dalam tingkah laku prajurit, karena ada kebencian tersendiri terhadap komunis, mengingat berbagai upaya kudeta oleh orang komunis Indonesia, yang terakhir oleh PKI tahun 1965. (Lela E. Madjiah, 2002: 164-166). Timor Timur yang kini bernama Timor Lorosae, resmi menjadi Negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hubungan antara Indonesia dengan Timor Lorosae pada masa depan masih menjadi tanda tanya. Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi hubungan keduanya, baik di sisi Indonesia maupun Timor Timur. Secara geografis, kedua Negara bertetangga dan layaknya tetangga, tentu semua pihak mengharapkan hubungan yang harmonis. Akbar Tanjung politisi Golkar mengatakan, Indonesia tetap perlu membina hubungan baik dengan Negara itu pada masa mendatang, sebagaimana dengan Negara tetangga yang lain. Semoga. (Lela E. Madjiah, 2002: 184-185).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pemahaman dan analisa dari bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik dan krisis moneter di Indonesia serta desakan dunia internasional yang semakin menguat yang mana sebelumnya di era perang dingin, Amerika Serikat dan sekutunya berpihak pada integrasinya Timor Timur ke Indonesia. Namun, pasca perang dingin yang menandai pula selesainya persaingan ideologi liberalisme versus komunisme, mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Timor Leste. Sebagai wujud dari semangat reformasi, Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberikan dua pilihan bagi rakyat Timor Timur, yaitu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh otonomi luas, atau memisahkan diri lalu membentuk Negara merdeka. Kegagalan pokok dalam menangani Timor Timur itu berupa ketidakmampuan pemerintah merebut hati rakyat. Kesempatan pemerintah Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa, untuk membuktikan bahwa hidup bersama dengan bangsa Indonesia adalah pilihan terbaik, telah disia-siakan tidak saja oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi juga oleh tokoh-tokoh Timor Timur yang diberi kesempatan berkuasa. Kekuasaan yang dimiliki tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi lebih banyak untuk menumpuk kekayaan diri sendiri dan kelompoknya. Setelah Timor Leste merdeka, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah seperti asset-aset pemerintah dan para pengungsi. Serta masalah yang paling disorot pihak internasional yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah jajak pendapat. Rekonsiliasi merupakan kata kunci bagi hubungan Indonesia-

Timor Lorosae pada masa depan. Akan tetapi, rekonsiliasi bukan sesuatu yang mudah karena ada begitu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan TNI, baik ketika TNI untuk pertama kali masuk ke Timor Timur maupun selama 23 tahun Timor Timur berada di bawah pemerintahan Indonesia. Hubungan baik dengan Timtim juga mutlak, terutama karena negara baru itu dapat menjadi *pull faktor* yang bisa mengancam disintegrasi Indonesia. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka dapatlah dikemukakan saran-saran sebagai berikut, antara lain:

1. Sebagai bangsa yang besar yang memiliki ribuan pulau dan bermacam-macam adat istiadat, kita harus bisa menerima keputusan Timor Leste untuk berpisah dan berdiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Namun, hal tersebut harus kita jadikan acuan agar tidak terjadi lagi pada daerah-daerah lain di Indonesia. Pemerintah harus bisa meminimalisir rasa kedaerahan yang berlebihan, menciptakan keadilan yang merata pada semua daerah dan yang paling penting adalah membasmi praktek KKN di Negara ini.
2. Segala permasalahan yang mendera bangsa Indonesia kita jadikan sebagai motivasi semangat cinta tanah air dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Setiap permasalahan kita selesaikan bersama-sama tanpa adanya sikap emosional dan diselesaikan dengan bermusyawarah mencari solusi yang terbaik.
3. Kita jadikan setiap peristiwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebagai iktibar atau peringatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Semoga dengan iman dan taqwa, kita dapat membentengi bangsa ini khususnya diri sendiri dari derasnya pengaruh globalisasi dan modernisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Cipto, Bambang. *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri. 2006.
- Hadi dkk., Syamsul. *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Jasmi, Khairul. *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Kuntari, CM Rien. *Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2008.
- Kuntowijaya. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang. 1995.
- Madjiah, Lela E.. *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*. Jakarta Pusat: Antara Pustaka Utama. 2002.
- Nevins, Joseph. *Pembataian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Galang Press. 2008.
- Syukur, Iqbal dan Kamaruddin. *Paham-Paham Besar dalam Sejarah*. Pekanbaru: Cendikia Insani. 2006.
- Tomodok,E.M.. *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1994.
- Yulianto, Arif. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. 2002.
- <http://oppb.webs.com/Buletin.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17630/4/Chapter%20I.pdf>
- ICTJ-Indonesia-Commission-Monitoring-2008-Indonesian/PDF/ ctj.org  
*Kompas*, 7 Agustus 2001
- Kompas* (12/2/99)
- TEMPO, 6 Sept. 1999/TEMPO.com
- Tempo Online/14 Februari 1999
- Tempo, 20 Sept. 1999/Tempo.com
- [www.etan.org/pdf](http://www.etan.org/pdf)

